



Serahkan Aset ke Daerah

PONTIANAK - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Barat Kadrie meminta aset-aset milik Pemprov Kalbar yang masih berpotensi menjadi temuan dan berada di tingkat kabupaten/kota sebaiknya pengelolannya diserahkan kepada kabupaten/kota.

"Saya pikir itu jalan terbaik. Sejauh ini kami juga belum ada data-data di mana saja aset-aset milik Pemprov Kalbar berada di kabupaten/kota," katanya belum lama ini di Pontianak.

Menurut dia, itu menjadi salah satu solusi supaya persoalan aset di tingkat pemerintah dapat dituntaskan dengan baik. Selama ini Pemprov Kalbar selalu memperoleh predikat Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK dengan status Wajar Tanpa Pengecualian. "Predikat tersebut dapat dipertahankan. Biasanya masalah aset menjadi persoalan utama di BPK,"

ucapnya.

Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan aset-aset di Kalbar belum dikelola dengan baik dan masih berkebaran di Kabupaten/Kota. Menurutnya aset-aset tersebut didata kemudian dicarikan jalan keluar untuk mencari titik temu terbaik. "Intinya setiap aset milik Pemprov Kalbar harus ada kejelasan. Sehingga ketika diproses sesuai aturan. Aset-aset tersebut harus sejalan," tuturnya.

DPRD memiliki wacana membenarkan tim pansus aset guna menelusuri berapa banyak aset peruntukannya tidak mengikuti aturan. Tujuannya juga untuk menyempurnakan pendataan sehingga di administrasi pemerintah, soal aset tidak selalu muncul.

Tim komisi III DPRD Kalbar sebelumnya sudah melakukan rapat den-

gan tim aset dan DPPKAD Pemprov Kalbar. Dia baru mengetahui beberapa aset di Kalbar, peruntukannya banyak belum sesuai. Bahkan ada salah satu aset berfungsi maksimal tetapi tidak memiliki pemasukan bagi daerah. "Ada itu," katanya tanpa mengungkapkan aset dimaksud.

Sekretaris Pemprov Kalbar, Zeet Hamdy Assovie beberapa waktu lalu pernah mengutarakan terkait permasalahan aset semua jajaran diminta menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan. "Jangan lagi menggulung-n gulur waktu. Jangan sampai



Intinya setiap aset milik Pemprov Kalbar harus ada kejelasan. Sehingga ketika diproses sesuai aturan. Aset-aset tersebut harus sejalan

akibat permasalahan yang lambat penyelesaiannya bisa merugikan pemerintah daerah," katanya.

Dia menambahkan opini WTP yang telah diraih Pemprov Kalbar bukan dipatkan secara mudah. Semuanya butuh perjuangan dan kerja keras. Laporan keuangan yang baik, tetapi memiliki aset yang bermasalah sama saja dapat mempengaruhi opini WTP yang telah diperoleh. "Makanya terus pertahankan opini WTP dengan bekerjasama secara baik dan saling mendukung dalam rangka menciptakan pengelolaan aset andal dan akuntabel," ungkap dia. *(den)*